

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Desa sebagai organisasi pemerintah menjadi tolak ukur dalam mencapai keberhasilan dari segala urusan pemerintah. Keberadaan desa memiliki kedudukan yang sangat penting karena sebagian besar wilayah Indonesia berada di pedesaan sehingga harus mendapat perhatian khusus untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat.

Penerapan otonomi daerah di Indonesia mendesak pemerintah daerah untuk melakukan akuntabilitas sektor publik sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Akuntabilitas sektor publik terdiri dari berbagai aspek, salah satunya adalah akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas keuangan dan Akuntabilitas kinerja suatu Pemerintah dapat berdampak pada tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah dalam mengelola penggunaan Dana Desa.

Pasca orde baru, Indonesia mengalami banyak perubahan khususnya dalam sistem pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem sentralistik, namun seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah saat ini menganut desentralisasi fiskal, dekonsentrasi, dan tugas pembangunan. Hal ini sesuai dengan Tap MPR Nomor: XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan kekuasaan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan MPR tersebut menjadi landasan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Mardiasmo, 2018).

Di Indonesia sendiri kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan penyelenggara negara cenderung mengalami kemunduran bahkan ada yang

menyatakan mereka tidak perlu lagi adanya pemerintahan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yaitu karena adanya kesenjangan ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan kinerja pemerintah sesungguhnya (Welch et al., 2005). Grosso & Ryzin (2011), menyatakan bahwa salah satu cara untuk mencapai kepuasan masyarakat adalah penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dapat dilakukan dengan membuat laporan keuangan dan kinerja pemerintah.

Rahmawati (2013) Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Untuk melihat suatu daerah dinyatakan akuntabel atau tidak, bisa dilihat dari laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah apakah sudah sesuai dengan prinsip *value for money* atau belum. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik merupakan wujud akuntabilitas daerah. Pemerintah menganggap adanya akuntabilitas mampu memberikan perubahan kinerja di instansi pemerintahan yang lebih baik atau yang dikenal dengan istilah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penerapan *good governance* sangat diyakini memberikan kontribusi yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing, serta sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan. Terwujudnya *good governance* bisa terlihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang di berikan pemerintah dengan melihat akuntabilitasnya. Pemerintah daerah harus dapat mempertanggung jawabkan atas pelayanan publik yang terbuka sebagai perwujudan *good governance* khususnya dalam penggunaan dana desa yang sedang berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas sektor publik terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat dalam penggunaan dana

desa di Lampung tepatnya di Kecamatan Tanjung Bintang, maka peneliti melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Atas Penggunaan Dana Desa Di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan”.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara, fenomena yang terjadi di Kecamatan Tanjung Bintang tentang penggunaan dana desa dapat dirasakan oleh masyarakat seperti infrastruktur yang sudah memadai di desa, pembangunan yang berkembang dan kelengkapan segala keperluan dan kegiatan desa. Dibalik itu semua masyarakat merasakan terkadang masih kurang merata dalam hal program kerja dari pemerintah terkait dana bantuan yang diberikan, hal tersebut dapat di maklumi oleh pemerintah karena yang tadinya pada saat pandemi covid-19 sebesar 40% untuk alokasi membantu masyarakat sekarang hal tersebut di ganti dengan BLTDD yang hanya sebesar 10% saja hal itu pasti akan menyebabkan perselisihan antar masyarakat yang sebelumnya dapat bantuan menjadi tidak dapat, maka dari itu pemerintah kecamatan telah menyarankan untuk setiap desa melakukan penyuluhan dan benar – benar mencari masyarakat yang memang membutuhkan agar tidak berselisih antar masyarakat di karenakan kebijakan baru dari pemerintah terkait bantuan dana yang diberikan. Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja sudah cukup dirasakan oleh masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung, akuntabilitas keuangan di desa terlihat jelas pemanfaatan dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa, akuntabilitas kinerja sangat dirasakan oleh masyarakat pada saat mereka membutuhkan bantuan dari aparat desa.

Berdasarkan berita di situs <https://beritatrends.co.id/>, Kementerian Desa mendorong pelaporan dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) di Desa Budi Lestari, Kecamatan Tanjung Bintang, yang melibatkan kepala desa Dasman. Setelah pemberitaan viral, Dirjen Wilayah lima, Hasrul, meminta agar masalah ini dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), dengan salinan ke Inspektorat dan Kemendes. Inspektorat Lampung Selatan, melalui Irban V, Haerul Anwar, juga mendorong pelaporan ke APH dan menyatakan kesiapannya untuk

melakukan pemeriksaan setelah tindak lanjut dari APH. LSM Maju Adil Jagat Aman Sentosa (MAJAS) bersiap melaporkan penyimpangan DD ke Kejaksaan Tinggi Lampung setelah mendapat saran dari Dirjen Wilayah V. LSM juga mempertimbangkan aksi demo untuk mempercepat proses pemeriksaan oleh APH. Dugaan ketidakpatuhan pembayaran pajak dan siltap oleh Dasman, kepala desa Budi Lestari, juga mencuat dalam data LSM MAJAS, mencapai nilai lebih dari 200 juta selama tiga tahun terakhir.

Fenomena tersebut menggambarkan urgensi penelitian terkait pengaruh akuntabilitas keuangan dan kinerja terhadap kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap penggunaan dana desa. Kasus yang meruncing ini mengindikasikan bahwa sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan di tingkat desa memainkan peran sentral dalam potensi penyelewengan. Respons Kementerian Desa yang mengarahkan pelaporan ke Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat memberikan kontribusi pada pemahaman bagaimana intervensi pemerintah dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan. Selanjutnya, persiapan laporan ke Kejaksaan Tinggi Lampung dan rencana aksi demo oleh LSM MAJAS menyoroti peran lembaga penegak hukum dan masyarakat sipil dalam menanggapi ketidakpatuhan. Selain itu, dugaan ketidakpatuhan dalam membayar pajak dan siltap oleh kepala desa menjadi cerminan potensial dampak negatif terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan dan pengelolaan dana desa. Melalui penelitian, dapat diungkapkan sejauh mana faktor-faktor ini berkontribusi pada dinamika kepercayaan dan kepuasan masyarakat terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa di wilayah tersebut.

Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan variable yaitu Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja terhadap Kepercayaan dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa. Dalam penelitian ini penulis meneliti di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

“Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap

Kepercayaan Dan Kepuasan Atas Penggunaan Dana Desa Di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan”.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Orang yang diteliti adalah seluruh masyarakat desa di Kecamatan Tanjung Bintang yang memahami tentang dana desa.
2. Variabel independen yang diteliti yaitu akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja.
3. Variabel dependen yang diteliti yaitu kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas penggunaan dana desa.
4. Tahun penelitian adalah tahun 2022/2023.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan?
2. Apakah akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan?
3. Apakah akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan?
4. Apakah akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguji secara empiris apakah akuntabilitas keuangan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

- b. Untuk menguji secara empiris apakah akuntabilitas keuangan dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Untuk menguji secara empiris apakah akuntabilitas kinerja dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Untuk menguji secara empiris apakah akuntabilitas kinerja dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada perkembangan ilmu pengetahuan yang akan datang. Serta kepada pembaca khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas penggunaan dana desa.

- b. Manfaat Praktisi

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang variable-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap penggunaan dana desa.
2. Bagi pemerintah desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah desa sehingga dapat meningkatkan pelayanan serta kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

1.6 Sistematis Penulisan

Sistematis penulisan ini dilakukan dengan menuliskan bab yang terdiri atas lima bab. Dimana setiap bab akan disusun secara sistematis sehingga dapat menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang kerangka pemikiran dalam pembahasan masalah yang akan diteliti dan sebagai landasan yang diambil dari berbagai literature selain itu landasan teori juga memaparkan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas penggunaan dana desa.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, saran dan keterbatasan yang merupakan bab penutup dari penulisan skripsi. Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi tentang informasi lebih lanjut bahwa karya penulis merupakan hasil dari berbagai sumber.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi tentang data yang mendukung pembahasan uraian data yang berisikan penjelasan.